

Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Gusmardi, Amri Amir, Muhammad Syafri

UNJA, Jambi, Indonesia

Correspondence email: gusmardiusman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pengangguran dan indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021, kedua untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran terhadap indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021, dan ketiga untuk menganalisis implikasi kebijakan terkait indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel gabungan antara *Cross section* 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi dengan data *Time series* selama 2017-2021, data penelitian yang berasal dari Badan Pusat Statistika dan Kementrian Keuangan.. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan alat analisis *eviews 12*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, Pengangguran dan Indeks Keparahan Kemiskinan diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas yaitu indeks keparahan kemiskinan dengan probability sebesar 0,0000 dan R^2 sebesar 0,871104 yang berarti indeks keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh model sebesar 87,11% sedangkan 12,89% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

Kata kunci : Indeks Keparahan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Pengangguran

ABSTRACT

*This study aims to analyze the development of education spending, health spending, education level, health degree, unemployment and poverty severity index in regencies/cities in Jambi Province during 2017-2021, secondly to analyze the influence of education spending, health spending, education level, degree health, and unemployment on the poverty severity index in districts/cities in Jambi Province during 2017-2021, and thirdly to analyze policy implications related to the poverty severity index in districts/cities in Jambi Province during 2017-2021. The data used in this study is secondary data with a combined panel data type between Cross sections 11 Regencies/Cities in Jambi Province with Time series data for 2017-2021, research data originating from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. This study uses panel data regression analysis and uses the *eviews 12* analysis tool. Based on the results of a descriptive analysis of the variables Education Spending, Health Spending, Education Level, Health Degree, Unemployment and Poverty Severity Index, it was concluded that developments during the 2017-2021 period have fluctuated from year to year. Based on individual quantitative analysis, the variables of education level, health degree, and unemployment have a significant effect on the poverty severity index, while the education expenditure and health expenditure variables do not have a significant effect on the poverty severity index. Based on the quantitative analysis carried out, it was found that together the independent variables in the study had a significant effect on the independent variables, namely the poverty severity index with a probability of 0.0000 and R^2 of 0.871104, which means that the poverty severity index can be explained by the model of 87.11 % while 12.89% is influenced by variables outside the model.*

Keywords : Poverty Severity Index; Education; Health; Unemployment

PENDAHULUAN

Artikel dimulai dengan penjelasan latar belakang, yaitu alasan perlu dilakukannya penelitian, yang didukung referensi/literatur pendukung. Referensi tidak diperkenankan menggunakan sumber yang tidak baku seperti wikipedia ataupun blog, dst (Abdul, 2017). Editor (2018) mensyaratkan agar artikel orisinal dan bukan merupakan plagiat hasil karya orang lain. Tujuan dituliskan pada bagian akhir latar belakang. Jumlah referensi minimum yang digunakan delapan. Penulisan referensi dan kutipan mengacu pada APA style.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pengembangan harus mengarahkan setiap tahap lebih dekat ke tujuan, hidup bermartabat adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal. (Undang-undang Dasar, 1945) menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa tugas utama Pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya, hidup yang bebas dari kemiskinan dan pengangguran, hidup yang layak, merupakan hak asasi setiap warga negara dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Pada hakekatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan.

Pemerintah daerah memahami pembangunan masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan terutama untuk pembangunan daerah-daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah menetapkan akar dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek, serta dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan suatu negara adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pengaruh penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan terpenting dalam memilih strategi dan alat pembangunan. Artinya, salah satu kriteria utama dalam memilih bidang atau pilar prioritas pembangunan nasional adalah efektifitasnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin (Simatupang & Dermoredjo, 2003).

Menurut (Harlik et al., 2013), Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ketiaktampilan untuk berusaha meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidup. Ada dua ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk melampaui garis kemiskinan yang ditentukan. Kemiskinan relatif, di sisi lain, mengacu pada perbedaan tingkat pendapatan satu kelompok dibandingkan dengan yang lain.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah multifaset karena terkait dengan pendapatan rendah, buta huruf, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dan lingkungan yang buruk (Lanjouw et al., 2001). Menurut Bank Dunia, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Lebih jauh lagi, kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya kesempatan kerja, dengan mereka yang tergolong miskin biasanya menganggur (unemployed) dan umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang jelas berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatan perlu diintegrasikan, dikoordinasikan dan terintegrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah diseluruh wilayah di Indonesia termasuk bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi. Kondisi kemiskinan tentunya berbeda-beda pada setiap wilayah karena kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masing-masing wilayah juga berbeda.

Tingginya angka kemiskinan daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai masalah social, politik, dan ekonomi. Namun, flow effect yang diharapkan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak diikuti turunnya angka kemsikinan.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Misdawita & Sari, 2013), investasi negara dalam bentuk biaya pendidikan dan kesehatan juga dapat dijadikan sebagai faktor penentu pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Ketika distribusi sektor publik meningkat, itu juga meningkatkan produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas seperti itu pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan manusia, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa belanja publik sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan.

Selain investasi negara dalam bentuk biaya pendidikan dan kesehatan menurut (Lanjouw et al., 2001) bahwa pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengentasan kemiskinan. Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan lebih masuk akal bagi orang miskin daripada orang tidak miskin karena sumber daya yang paling penting bagi orang miskin adalah tenaga kerja.

Panjaitan, (2017) berpendapat bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara tingginya pengangguran dan kemiskinan. Bagi kebanyakan orang, mereka yang tidak bekerja penuh waktu atau paruh waktu akan selalu menjadi sangat miskin. Pekerja dengan gaji tetap di sektor publik dan swasta cenderung berada di kelas menengah ke atas. Mereka yang tidak bekerja adalah orang miskin dan orang yang bekerja penuh waktu adalah orang kaya.

Tabel. 1 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan
2017	0,19
2018	0,31
2019	0,26
2020	0,27
2021	0,23

*) Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 0,19 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 0,31 kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 0,26 meningkat pada tahun 2020 pada angka 0,27 namun pada tahun 2021 kembali turun ke angka 0,23, fenomena ini menunjukkan permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, dilihat dari indeks keparahan kemiskinan yang belum konstan menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jambi dalam periode 2017-2021 indeks keparahan kemiskinan berfluktuasi, ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk semakin meningkat yang berarti kemiskinan semakin parah di Provinsi Jambi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah menganalisa perkembangan belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pengangguran dan indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021; kemudian menganalisa pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran terhadap indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021; dan menganalisa bagaimana implikasi kebijakan terkait indeks keparahan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021.

METODE

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, model analisis data adalah regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel gabungan data runtut waktu (*data time series*) selama kurun waktu tahun 2017-2021 dan data deret lintang (*cross section data*) yang meliputi 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Kementerian Keuangan.

Operasional Variabel

1. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan indeks.
2. Belanja Pendidikan adalah realisasi belanja publik yang dialokasikan pemerintah yang difungsikan untuk pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Belanja Kesehatan adalah realisasi belanja publik yang dialokasikan pemerintah yang difungsikan untuk kesehatan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Tingkat pendidikan adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di suatu daerah yang diukur dalam angka partisipasi sekolah (APS) di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan persen.
5. Derajat kesehatan adalah rata – rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu yang diukur dalam angka harapan hidup (AHH) di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam satuan tahun.
6. Pengangguran adalah jumlah penduduk usia kerja yang berumur diatas 15 tahun yang pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yang dinyatakan dalam sauna jiwa.

HASIL

Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan

Di dalam kemiskinan terdapat Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk, dan dapat diinterpretasikan bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dibawah ini dapat dilihat data Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten-kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017 s/d 2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	0,20	0,51	0,12	0,10	0,31
Merangin	0,49	0,52	0,57	0,38	0,25
Sarolangun	0,29	0,69	0,39	0,27	0,38
Batanghari	0,23	0,51	0,25	0,25	0,30
Muaro Jambi	0,08	0,07	0,21	0,07	0,07
Tanjung Jabung Timur	0,56	1,05	0,56	0,47	0,31
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,67	0,42	0,44	0,41
Tebo	0,23	0,19	0,26	0,26	0,14
Bungo	0,22	0,29	0,13	0,16	0,17
Kota Jambi	0,43	0,27	0,28	0,42	0,25
Kota Sungai Penuh	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05

*) Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi menetapkan indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk daerahnya masing-masing. Dapat dilihat bahwa rata-rata indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung timur pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.05 persen yang terutama banyak dijumpai pada petani dan nelayan. Kemiskinan pada petani terutama dijumpai pada petani pangan, karena hanya menghasilkan panen satu kali dalam satu tahun

dengan produksi rata-rata 3,45 ton per hektar. Kelompok lain adalah masyarakat nelayan yang acap terperangkap pada kondisi, ketidakmampuan menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya laut dan wilayah pesisir untuk kehidupan mereka. Kemiskinan dapat terjadi karena kekurangan modal, rendahnya produktivitas, dan lemahnya penguasaan, dan pada tahun 2018 harga karet dan sawit mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap penduduk di kabupaten tanjung kabung timur yang tidak mempersiapkan terlebih dahulu jika harga produk sewaktu-waktu turun, sedangkan indeks keparahan kemiskinan yang terendah terdapat pada Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 0.03 persen, hal ini disebabkan kota sungai penuh ini memiliki jumlah penduduk yang paling kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selain itu juga karena kota sungai penuh merupakan pemekaran dari kabupaten kerinci sehingga banyaknya penduduk miskin tetap berada di kabupaten kerinci dan kota sungai penuh sebelum dipisah dari kabupaten kerinci merupakan suatu wilayah pusat perekonomian kabupaten kerinci.

Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan

Teori pemilihan metode, yang menyatakan bahwa metode common constant terlalu sederhana untuk menggambarkan fenomena yang ada. Oleh karena itu perlu untuk menemukan nature yang spesifik atas hubungan yang terjadi diantara masing-masing individu pada data cross section. Maka data diolah dengan menggunakan metode Fixed Effect dengan nilai R^2 sebesar 0.871104 dengan kategori memuaskan. Nilai *probability* dari *f-stat* senilai 0.000000 yang berarti bahwa model tersebut *significant* dengan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2.583893. dapat dilihat pada tabel 3 penelitian ini.

Tabel 3. Output Fixed Effect Method

Dependent Variable: IKK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/23/23 Time: 11:07				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.974899	2.450324	2.438412	0.0194
LOG(BP)	-0.108724	0.118493	-0.917559	0.3645
LOG(BK)	-0.044364	0.092903	-0.477527	0.6357
TP	-0.010832	0.003455	-3.134996	0.0033
DK	-0.036251	0.007953	-4.558325	0.0000
LOG(PGG)	0.100377	0.054281	1.849218	0.0720
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.070768	R-squared	0.871104	
Mean dependent var	0.302909	Adjusted R-squared	0.821528	
S.D. dependent var	0.198929	S.E. of regression	0.084039	
Akaike info criterion	-1.877014	Sum squared resid	0.275443	
Schwarz criterion	-1.293062	Log likelihood	67.61788	
Hannan-Quinn criter.	-1.651195	F-statistic	17.57128	
Durbin-Watson stat	2.583893	Prob(F-statistic)	0.000000	

*) Data diolah dengan *Eviews 12*

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Nilai *R squared* pada tabel diatas sebesar 0,871104, hal ini menunjukkan bahwa 87,11% variabel indeks keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pengangguran. Sisanya sebesar 12,89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Signifikansi indikator koefisien adjusted R2 signifikan atau tidak, dapat diuji dengan alat uji statistik metode Fisher. (Uji F) dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Nilai prob F-statistic adalah $0,0000 < 0,010$ Hal ini memberikan arti bahwa variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pengangguran secara bersama- sama (simultan) signifikan berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (sebagian) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Jika tingkat signifikansinya di bawah 10% maka secara parsial belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan. Berikut ini dapat dijelaskan pengujian hipotesis masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

Belanja Pendidikan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikansi Belanja Pendidikan sebesar 0,3645 dengan perbandingan $0,3645 > 0,10$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Belanja Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien Belanja Pendidikan adalah -0,108724, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara Belanja Pendidikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan.

Belanja Kesehatan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikansi Belanja kesehatan sebesar 0,6357 dengan perbandingan $0,6357 > 0,10$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien Belanja Kesehatan adalah -0,044364, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara Belanja Kesehatan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan.

Tingkat pendidikan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikansi tingkat pendidikan sebesar 0,0033 dengan perbandingan $0,0033 < 0,10$ artinya H_a diterima dan H_0 ditolak artinya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien Tingkat Pendidikan adalah -0,010832 hal ini memperlihatkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan, jika Tingkat Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,010832.

Derajat Kesehatan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita signifikan Derajat Kesehatan sebesar 0,0000 dengan perbandingan $0,0000 < 0,10$ artinya H_a diterima dan H_0 ditolak artinya Derajat Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien Derajat Kesehatan adalah -0,036251, hal ini berarti adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Derajat Kesehatan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan, jika Derajat Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,036251.

Pengangguran

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas signifikan pengangguran sebesar 0,0720 dengan perbandingan $0,0720 < 0,10$ artinya H_a diterima dan H_0 ditolak artinya pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan kab/kota di Provinsi Jambi. Nilai koefisien pengangguran adalah 0,100377, hal ini memperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengangguran terhadap indeks keparahan kemiskinan, jika pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1 jiwa maka akan menyebabkan kenaikan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,100377.

Implikasi Kebijakan

Selain jumlah penduduk miskin yang bertambah, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia juga meningkat, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin namun harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin besar indeksnya, maka kemiskinan semakin dalam. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, Dua indeks tersebut menggambarkan dampak dari pandemi Covid-19 sangat memukul kondisi ekonomi masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan meningkat, dengan jumlah peningkatan tertinggi di perkotaan daripada pedesaan, kelompok yang paling terdampak Covid-19 adalah yang bekerja di sektor informal. Pemerintah memiliki beberapa usaha untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 (Sitorus, 2016). Bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau Social Safety (BNPB, 2020). Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik.

Akibatnya, kotamadya dan kota diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kemungkinan dan kebutuhan daerah. Juga, melaksanakan perubahan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan, serta penguatan staf dengan mengutamakan profesionalisme. Peningkatan pendidikan memiliki beberapa pilar utama; 1) Manajemen Sekolah. Hal ini mencakup, a) Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan/manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. b). Kepala sekolah dan stafnya didorong berinovasi dan berimprovisasi agar menjadi kreatif dan berprakarsa. c) Kepala sekolah dan masyarakat sekolah menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan. 2) Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, meliputi: a) Kepala sekolah dan guru harus memahami konsep belajar dan cara belajar anak dan memandang anak sebagai individu yang unik yang mempunyai kemampuan yang berbeda. b) Proses pembelajaran didesain dengan memanfaatkan organisasi kelas agar guru dan siswa menjadi Aktif dan Kreatif yang mendukung terciptanya pembelajaran yang Efektif namun tetap Menyenangkan. 3) Peran Serta Masyarakat, meliputi: a. Menggali inisiatif, prakarsa, dukungan, dan kontribusi masyarakat untuk pendidikan sekolah. b) Masyarakat terlibat dan merasa memiliki sekolah. c) Sekolah yang paling berhasil & diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerja sama secara aktif mengembangkan sekolah. Pelaksanaan MBS memerlukan kerja yang harmonis agar pelaksanaan komponen sekolah yang berbeda tidak saling tumpang tindih atau saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengkonkretkan visi dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dengan cara merespon kebutuhannya. Kebijakan pendidikan adalah produk yang digunakan sebagai panduan untuk pengambilan keputusan pendidikan, yang netral secara hukum dan cukup disesuaikan dengan lingkungan pendidikan. Tugas kebijakan pendidikan adalah menjadikan kebijakan pendidikan sebagai pedoman tindakan yang mengarahkan tindakan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama masyarakat dan pemerintah.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Besaran angka pengangguran yang terus meningkat tiap tahun, pendapatan yang tidak merata (daya beli rendah), jeleknya kesehatan, gizi buruk serta pendidikan yang relatif rendah menjadikan ciri-ciri sebagai negara sedang berkembang bagi Indonesia semakin kuat. Ledakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan dengan tidak diimbangi skill memadai menjadikan kota sebagai tumpukan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Konsep angkatan kerja sebagaimana yang disarankan oleh ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun strategi pemecahannya antara lain disarankan dengan : (1) Mendorong masuknya investor asing (2) Peningkatan kualitas tenaga kerja (3) Peningkatan kualitas program KB dan Transmigrasi dan (4) Program lain seperti padat karya dan pemberdayaan kemampuan masyarakat desa.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Pengangguran terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, Pengangguran dan Indeks Keparahan Kemiskinan diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun
2. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan.
3. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas yaitu indeks keparahan kemiskinan dengan probability sebesar 0,0000 dan R^2 sebesar 0,871104 yang berarti indeks keparahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh model sebesar 87,11% sedangkan 12,89% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/945/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-.html>
- Harlik, H., Amir, A., & Hardiani, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1500>
- Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending? December. Working Paper, World Bank, Washington, DC. *Education and Health Expenditures, and Development: The cases of Indonesia and Peru*, December, 17–48. <https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/2739.html>
- Misdawita, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161.
- Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan:

Gusmardi et al., *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Kearifan Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021*

Hipotesis “Trickle Down” Dikaji Ulang. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 51(3), 291–324.

Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (The Impact of Gender Inequality in Economic Growth in Indonesia). *Sosio Informa*, 2(1), 89–101. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/190/440>

Undang-undang Dasar 1945. (1945). *Undang-undang Dasar 1945*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>